



Polda Terkendala BPK-BPKP

Pontianak, BERKAT.

Direskrimum Polda Kalbar, Kombes (Pol) Purwadi Arianto, mengatakan banyak kasus korupsi menggantung di Polda Kalbar menunggu hasil audit investigasi baik itu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Kalbar.

“Yang jelas tegasnya Polda Kalbar tetap berkomitmen berantas tindak pidana korupsi apapun bentuknya, makanya selalu berkoordinasi dengan penyidik, baik itu dari Kajati Kalbar maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK),” tegasnya ketika bersama Kapolda Kalbar, Brigjend (Pol) Unggung Cahyono, serta jajaran tinggi Polda Kalbar saat bertandang di Harijan BERKAT, Senin, 6 November 2011.

Menurut Purwadi, banyak kasus-kasus korupsi di Kalbar sedang dalam penyelidikan Polda Kalbar. Beberapa di-



FOTO: JAHENW THAMIR

” Polda Komitmen Berantas Korupsi, Setahun 5 Kasus ”

PURWADI ARIANTO
Direskrimum Polda Kalbar

antaranya sedang menunggu hasil audit BPK atau BPKP.

“Yang jelas kita targetkan dalam 1 tahun, paling tidak 5 kasus korupsi bisa diungkap dan bisa limpahkan ke Kejaksaan,” tegasnya.

” Unggung Cahyono agar Berikan Perubahan ”

RETNO PRAMUDYA
Ketua Komisi A DPRD Kalbar

Sebagai contoh untuk kasus Bansos KONI Kalbar itu sedang di proses tinggal menunggu izin Presiden RI. Sementara mengenai asset tanah eks KONI 6,4 hektar di areal olahraga Pontianak sekarang ini sedang diselidiki oleh Mabes Polri



FOTO: DOX

karena pengurus KONI melaporkan kasus ini ke Mabes Polri,” katanya.

Sementara itu Ketua Komisi A DPRD Kalbar, Retno Pramudya, SH, MH, menilai alasan kepolisian terkendala audit BPK dan BPK serta izin presiden belum turun dalam penanganan kasus korupsi adalah alasan klasik yang dibuat-

LANJUTAN BACA HAL 11

Polda Terkendala BPK-BPKPdari Hal 1

buat.

"Polisi bisa saja mendesak BPK atau BPKP untuk mengeluarkan hasil audit terhadap kasus yang sedang diselidiki, walaupun itu tidak bisa, maka kita DPRD Kalbar siap membantu mendesak BPK dan BPKP," katanya.

Wajar lanjutnya, banyak kasus korupsi yang mandek di daerah. Ternyata dikarenakan tidak ada komitmen yang jelas dari aparat penegak hukum.

"Makanya kita mengharapkan Polda Kalbar Unggung Cahyono sebagai Kapolda Baru di Kalbar, bisa memberikan perubahan yang baik di Kalbar. Paling tidak, Unggung bisa menunjukan kepada masyarakat bahwa Polda Kalbar punya komitmen memberantas korupsi hingga tuntas," jelasnya.

Retno juga menghimbau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar, menuntaskan hasil audit kasus-kasus korupsi yang diminta penyidik seperti kejaksaan atau kepolisian sehingga kasusnya bisa selesai.

Menurutnya, ini dilaksanakan dalam rangka komitmen penegakan hukum di Kalbar yang sejauh ini dirasakan lemah, apalagi kasus-kasus korupsi banyak di sejumlah daerah di Kalbar.

"Rata-rata kasus korupsi terkendalakarena menunggu hasil audit BPKP atau BPK. Dan itu yang selalu dilontarkan pihak kepolisian atau kejaksaan. Makanya kita minta sekarang BPKP atau BPK harus segera mengeluarkan hasil audit kasus-kasus korupsi di Kalbar," katanya, kemarin di ruang kerjanya.

Ia meminta BPKP atau BPK jangan terkesan melindungi kasus-kasus korupsi. Apalagi mempetieskan kasus tersebut sehingga menghambat penegakan supremasi hukum di Kalbar.

"Paling tidak yang diinginkan masyarakat, karena kasusnya sedang diselidiki pihak kepolisian atau kejaksaan, BPKP membantu mengeluarkan hasil audit terhadap kasus yang diperiksa tersebut. Tidak menggantungnya," jelas Retno.

Ini dilakukan agar tersangka tidak merasa tersandra hidupnya, apalagi tersangka belum tentu bersalah untuk kasus korupsi.

"Kalau tidak terbukti bisa saja kepolisian dan kejaksaan membuat SP3. Itupun setelah melihat hasil audit yang dikeluarkan BPKP. Tapi yang kenyataannya BPKP atau BPK terkesan lamban," jelasnya. (aca)